

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arifin, Zainal Mochtar, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2022)

Ashhidiqie, Jimly, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, (Depok: Universitas Indonesia, 2002)

_____, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

_____, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Depok: Rajawali Pers, 2019)

_____, Konstitusional dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, Teori-Teori Hukum, (Malang: Setara Press, 2018)

Fajar Laksono dan Subardjo, Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden, (Yogyakarta: UII Press, 2006)

Farida, Maria Indrasati, Ilmu Perundang-Undangan 1 : Proses dan Teknik Penyusunan, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020)

_____, Ilmu Perundang-Undangan 2 : Proses dan Teknik Penyusunan, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020)

Hendra Wahanu Prabandani, Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits of The Presidential Executive Power), (Jakarta: Biro Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015)

Kamis, Margarito, Pembatasan Kekuasaan Presiden: Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amendemen UUD 1945, (Malang: Setara Press, 2014)

Mahmud, Peter Marzuki, Penelitian Hukum : Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Prana, Bergas Jaya, Dasar-Dasar Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Legality, 2019)

Slamet, Titon Kurnia, Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pemahaman Awal, (Bandung : Mandar Maju, 2016)

Jurnal :

Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia : Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang Undang Dasar 1945.”, Jurnal Legislasi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 15, Nomor 2, Juli 2018

Aris Arianto, dkk, “Makna Persetujuan bersama DPR dan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang.”, Jurnal Mimbar Yustitia, Universitas Islam Darul’Ulum, Vol. 3, No. 1, Juni 2019

Belly Isnaeni, “Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. VI, No. 2, Juli Tahun 2021

Dailami Firdaus, dkk, “Pengenal Signature (Tanda Tangan) Menggunakan Extrime Learning Machine (ELM).”, Jurnal Arus Elektro Indonesia (JAEI), Fakultas Teknik - Universitas Jember, Tahun 2020

Denico Doly, “Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.”, Jurnal Negara Hukum, Peneliti Bidang hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekjen DPR RI, Vol. 4, No. 2, November 2013

Edi Yulistyowati, dkk, “Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komporatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen.”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016

Erik Santio dan Bahder Johan Nasution, “Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945.”, *Journal of Constitutional Law, Limbago*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2021

Helmi Chandra, “Kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Tanpa Tanda Tangan Presiden.”, *Jurnal PPKn & Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Volume 13 Nomor 1, April 2018.

Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, dkk, “Tinjauan Yuridis terhadap Pemberhentian Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”, *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 8, Nomor 4, Tahun 2019

Matio Julyanto dan Aditya Yuli Sulustyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.”, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019

Nina Mutmainnah, “Upaya Pemerintah Mempertahankan Posisi Sebagai Regulator Utama Penyiaran di Indonesia.”, *Jurnal Komunikasi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Volume 14, Nomor 1, Oktober 2019

Rahadani Yusran, “Peranan Argumentative Turn dalam Kebijakan Publik: Studi tentang Dinamika Kebijakan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.”, *Jurnal Demokrasi*, Vol. VI, No. 1, Tahun 2007

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran – Negara dan Berita Negara R.I.S. dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29)

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128)

Artikel Online :

Abi Sarwanto, CNN Indonesia, “Pembahasan Alot, Alasan Yasonna Tak Lapor UU MD3 ke Jokowi”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180315184301-32-283364/pembahasan-alot-alasan-yasonna-tak-lapor-uu-md3-ke-jokowi>, pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 22.52 WIB

Antara, INews, “Ini Alasan Presiden Jokowi Tak Tandatangani UU MD3”, diakses dari <https://www.inews.id/news/nasional/ini-alasan-presiden-jokowi-tak-tandatangani-uu-md3>, pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 21.52 WIB

Damang Averroes Al-Khawarizmi, Negara Hukum, “Tujuan Tanda Tangan”, diakses dari <https://www.negarahukum.com/tujuan-tanda-tangan.html>, pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 11.42 WIB

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, “Sejarah Provinsi Kepulauan Riau”, diakses dari <https://www.dinkesprovkepri.org/index.php/profil/sejarah-provinsi-kepulauan-riau#:~:text=Pembentukan%20Kepulauan%20Riau%20sebagai%20provinsi,merupakan%20bagian%20dari%20Provinsi%20Riau>, pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 23.45 WIB

DPR RI, “DPR : Hak Imunitas Lindungi Tugas dan Kewenangan Sebagai Wakil Rakyat” diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14422>, pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 21.10 WIB

HukumOnline, “Megawati Dituntut Lebih Serius Membahas RUU Penyiaran”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/megawati-dituntut-lebih-serius-membahas-ruu-penyiaran-hol5590?page=all>, pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 14.15 WIB

HukumOnline, “Prof. Mardjono : Asal Lulus Ujian, Sarjana Syariah Bisa Jadi Advokat”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-mardjono-asal-lulus-ujian-sarjana-syariah-bisa-jadi-advokat-hol6696>, pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 00.23 WIB

Liputan6, “Karni Ilyas: RUU Penyiaran Harus Direvisi”, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/45492/karni-ilyas-ruu-penyiaran-harus-direvisi>, pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 13.51 WIB

Liputan6, “Natuna Siap Bergabung dengan Kepri”, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/43279/natuna-siap-bergabung-dengan-kepri>, pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 1.12 WIB

Sri Lestari, BBC Indonesia, “Ramai-Ramai Menolak UU MD3: Dari Petisi, Usulan Perppu, dan Uji Materi”, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43153986>, pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 22.44 WIB

Referensi lain :

DPR RI, Risalah Rapat Badan Legislasi Pengesahan Jadwal Pembahasan RUU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2017 (Rabu, 5 April 2017)

MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : 1999-2022, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008)

Tim Perancang Buku Panduan Tugas Akhir – Penulisan Hukum Universitas Diponegoro, Buku Panduan Tugas Akhir – Penulisan Hukum Program Studi S-1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2022)

LAMPIRAN

Nota Dinas Penunjukkan Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN
RISET ,DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 76918201 Faks. (024) 769185206
Laman : www.fh.undip.ac.id | Pos-el : [fh\[at\].live.undip.ac.id](mailto:fh[at].live.undip.ac.id)

31-01-2023

Nomor : Nota Dinas
Hal : Penunjukan Dosen Pembimbing

Yth. Sdr Dr.Lita Tyesta ALW,SH.M.Hum
Tim Dosen Pembimbing
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang

Dengan ini diberitahukan bahwa Tim Penentu Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang terdiri dari Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan, Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum, Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum dan seluruh Ketua Bagian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, telah menentukan Saudara sebagai Pembimbing Penulisan Hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Saudara berkenan melaksanakan proses pembimbingan penulisan hukum kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Muhamad Irsyad Sobari
NIM : 11000119130681
Bidang Minat : Hukum Tata Negara
Judul skripsi :



Makna Penandatanganan Presiden dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Berdasarkan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945

Pembimbing1 : Dr.Lita Tyesta ALW,SH.M.Hum
Pembimbing2 : Diastama Anggita Ramadhan, S.H.,LLM

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP-198407092008121002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM**

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 76918201 Faks. (024) 769185206
Laman : www.fh.undip.ac.id | Pos-el : [fh\[at\].live.undip.ac.id](mailto:fh[at].live.undip.ac.id)

31-01-2023

Nomor : Nota Dinas
Hal : Penunjukan Dosen Pembimbing

Yth. Sdr Diastama Anggita Ramadhan, S.H.,LLM
Tim Dosen Pembimbing
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang

Dengan ini diberitahukan bahwa Tim Penentu Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang terdiri dari Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan, Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum, Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum dan seluruh Ketua Bagian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, telah menentukan Saudara sebagai Pembimbing Penulisan Hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Saudara berkenan melaksanakan proses pembimbingan penulisan hukum kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Muhamad Irsyad Sobari
NIM : 11000119130681
Bidang Minat : Hukum Tata Negara
Judul skripsi :



Makna Penandatanganan Presiden dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Berdasarkan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945

Pembimbing1 : Dr.Lita Tyesta ALW,SH.M.Hum
Pembimbing2 : Diastama Anggita Ramadhan, S.H.,LLM

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP.198407092008121002

Dokumen Kerja Praktek



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang KodePos 50275
Tel. (024) 76918201 Faks. (024) 76918201
www.fh.undip.ac.id | email: [fh\[at\]live.undip.ac.id](mailto:fh[at]live.undip.ac.id)

Nomor : 1268 /UN7.5.1.2/DL/2022
Lamp. : Satu berkas
Hal : Pengantar Peserta Kerja Praktek

02 FEB 2022

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas 1B
Jl. Jenderal Achmad Yani No. 99, Procot, Kec. Slawi
Kab. Tegal, Jawa Tengah 52412

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka membentuk mahasiswa agar memiliki kemampuan dan kemahiran menerapkan ilmu pengetahuan hukum dan ketrampilan hukum serta memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional perlu dilaksanakan Kerja Praktek bagi Mahasiswa.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya mahasiswa yang tersebut dibawah ini dapat melaksanakan kegiatan Magang pada Instansi Bapak/Ibu pimpin dalam jangka waktu 30 hari kerja /180 jam yang akan dilaksanakan secara paruh waktu.

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan yakni :

No.	Nama	NIM	Bidang Minat	No. Hp
1.	Bintang Oktian Mahafi	11000119130237	Hukum Acara	08995459101
2.	Fanisa Mayda Ayiliani	11000119120106	Hukum Tata Negara	085225387387
3.	Hillary Lintang	11000119120058	Hukum Acara	087797769614
4.	Muhammad Alfin Fatih	11000119130665	Hukum Tata Negara	08996514362
5.	Muhammad Irsyad Sobari	11000119130681	Hukum Tata Negara	085713494470
6.	Radenta Dwi Krispriyoga	11000119120118	Hukum Perdata Barat	087848573060
7.	Rusydi Bagus Setyaningrat	11000119140241	Hukum Acara	088227859114
8.	Uswatun Khasanah	11000119120159	Hukum Acara	0895383088319

Adapun ruang lingkup kegiatan magang meliputi :

1. Periode magang selama 30 hari kerja.
2. Peserta Magang akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai yaitu penguasaan hukum positif pada berbagai bidang ilmu hukum (hardskills) serta penguasaan softskills yakni kemampuan komunikasi, kepemimpinan dan manajerial.
3. Peserta Magang tidak melaksanakan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan penguasaan kompetensi.
4. Dalam pelaksanaan kegiatan Magang didampingi oleh Pembimbing Magang yang berasal dari Instansi tempat Magang. Pembimbing Magang bertugas untuk memberikan pengarahan, menilai sikap dan perilaku selama pelaksanaan kegiatan Magang. (Panduan Magang Terlampir)
5. Pembimbing Magang akan memberikan penilaian yang tercantum dalam Surat Keterangan Magang
6. Pada Akhir kegiatan Magang :
 - a. Mahasiswa wajib menyusun laporan yang disetujui oleh Pembimbing Magang.
 - b. Instansi tempat Magang menerbitkan Surat Keterangan/Sertifikat Magang
7. Mahasiswa membuat catatan harian kegiatan Magang yang ditanda tangani oleh Pendamping Magang.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002



PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B

Jalan A. Yani Nomor 99 Telepon : (0283) 491854 – 491359
Slawi Kode Pos : 52412
Website: www.pn-slawi.go.id e-mail : pn.kab.tegaldislawi@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.U34/ 393 /Kp.07.01/2/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eryusman, S.H
Pangkat : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Slawi

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang masing – masing atas nama :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Fanisa Mayda Ayiliani | NIM. 11000119120106 |
| 2. Bintang Oktrian Mahafi | NIM. 11000119130237 |
| 3. Hillary Lintang | NIM. 11000119120058 |
| 4. Rusydi Bagus Setyaningrat | NIM. 11000119140241 |
| 5. Uswatun Khasanah | NIM. 11000119120159 |
| 6. Muhammad Alfin Fatih | NIM. 11000119130665 |
| 7. Muhammad Irsyad Sobari | NIM. 11000119130681 |
| 8. Radenta Dwi Krispriyoga | NIM. 11000119120118 |

Telah melaksanakan magang di Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 17 Januari s.d 17 Februari 2022

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Slawi, 17 Februari 2022

KETUA
PENGADILAN NEGERI SLAWI

ERYUSMAN, S.H
NIP. 19671222 198903 1 001



SERTIFIKAT

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

NOMOR : W12-U34 / 513 / KP.02.1/2/2022

Diberikan Kepada :

Muhammad Yisyad Sobari

Telah Melaksanakan Kegiatan Kerja Praktek, pada Kantor Pengadilan Negeri Slawi terhitung mulai
Tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022, dengan hasil **SANGAT BAIK.**

Slawi, 22 Februari 2022



ERYUSMAN, S.H.
NIP. 19671222 198903 1 001

Surat Keterangan Lolos Turnitin Perpustakaan FH Undip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Faks (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: fh[at]live.undip.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK TURNITIN

Tim Pemeriksa Kemiripan Tulisan Ilmiah telah memeriksa unggahan file atas nama:

Nama : Muhamad Irsyad Sobari
NIM : 11000119130681
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Tulisan : Makna Penandatanganan Presiden Dalam Proses Pembentukan
Undang-Undang di Indonesia Berdasarkan Pasal 20 UUD NRI Tahun
1945
Jenis Dokumen : Skripsi
Tgl Pemeriksaan : 30 Januari 2023

Menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi Turnitin terhadap tulisan ilmiah dengan judul di atas menghasilkan kemiripan/similarity sebesar 16% dengan sumber-sumber online lainnya. Oleh karena itu, tulisan ilmiah tersebut di atas dinyatakan LOLOS cek turnitin.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tim Verifikasi
Perpustakaan

Fahimah, S.Sos.
NIP. 197508132001122001

Sertifikat TOEFL SEU Undip



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU BUDAYA
SERVICE ENGLISH UNIT (SEU)

Jl. Hayam Wuruk No.3,
Pleburan, Semarang 50241
Telp. (024) 8312420,
Email Humas : seu@live.undip.ac.id
Email Operator Tes : eseutbundip@gmail.com
Website : seu.apps.undip.ac.id

E-CERTIFICATE

Certificate Number: 181 / UN7.F6 / SR / XII / 2022

This is to certify that

Name : MUHAMMAD IRSYAD SOBARI

Registration Number : 22121000033

Test date : 11 December 2022

has taken the online English Proficiency Test administered by Service English Unit, Faculty of Humanities Diponegoro University with the total score of 52 or equivalent to *SEU's PREDICTION TEST* for the *TOEFL TEST* score of 482

Semarang, 14 December 2022

Dean
Head,




Dr. Nurhayati, M.Hum
NIP. 196610041990012001

Rifka Pratama, S.Hum., M.A.
NPPU. H.7. 19900428 201807 1 001

TABLE OF EQUIVALENCE	
EPT	SEU's TOEFL Prediction
85 - 90	650 - 677
75 - 84	600 - 650
66 - 74	550 - 600
56 - 66	500 - 550
46 - 56	450 - 500
37 - 46	400 - 450
20 - 36	316 - 399



*The e-certificate of the EPT is valid for two years from the test date

<https://seu.apps.undip.ac.id/news/category/18> to verify and validate the e-certificate.

Scan the QR Code or visit

Sertifikat PKKMB

UNIVERSITAS DIPONEGORO



Sertifikat

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR : 1392/LUNZ/PHK/2019

Diberikan Kepada :

MUHAMAD IRSYAD SOBARI
NIM. 11000119130681
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI-HUKUM

Telah Mengikuti

Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Pendidikan Karakter (Pendikar)
Tahun Akademik 2019/2020



Semarang, 28 Oktober 2019
Rektor,



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
NIP. 196211101987031004